

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL DALAM PENYELENGGARANAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

M. Rafly Jaya Pratama
NPP. 30.0460

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Keuangan Publik
Email: parawie2001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd, M.M

ABSTACT

Problem Statement/Background (GAP): In the implementation of the capital expenditure budget, there is a relatively small budget realization and affects the implementation of regional government. It can be seen from the many complaints from the public about the damaged and inadequate road infrastructure and public facilities. **Purpose:** The purpose is to determine the effectiveness, constraints, and efforts that have been made to overcome obstacles to the implementation of capital expenditures in the City of Bandar Lampung. **Method:** This study uses a qualitative approach, descriptive method with an inductive framework. The data collection techniques used were semi-structured interviews, participant observation, and documentation. While data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** Based on the research results, the implementation of capital expenditure in the city of Bandar Lampung has been effective. The dimensions of clarity of goals to be achieved, clarity of strategy for achieving goals, careful planning, proper programming, and an effective monitoring and control system. Meanwhile, the dimensions of the analysis process and formulation of policies are solid and the availability of facilities and infrastructure is not yet effective. Constraints faced in the effectiveness of the implementation of capital expenditures, namely reporting which is often delayed, the lack of availability of funds contained in the regional treasury, and human resources who are less competent in their fields. **Conclusion:** the implementation of capital expenditure in the city of Bandar Lampung has been effective. Because the five dimensions have been running effectively, and the two dimensions have not been running effectively. There are several obstacles faced by the government of the city of Bandar Lampung in implementing capital expenditures, but the city government of Bandar Lampung also has efforts to overcome the obstacles it faces.

Keywords: *Capital Spending, Budget Realization, Local Government.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan anggaran belanja modal terdapat realisasi anggaran yang terbilang kecil dan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalanan dan fasilitas umum yang sudah rusak dan belum memadai. **Tujuan:** Tujuannya untuk mengetahui efektivitas, kendala, dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi penghambat pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar

Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif dengan kerangka berpikir induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung sudah efektif. Dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, dan sistem pengawasan dan pengendalian sudah berjalan dengan efektif. Sedangkan dimensi proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dan tersedianya sarana dan prasarana belum efektif. Kendala yang dihadapi pada efektivitas pelaksanaan belanja modal yaitu pelaporan yang seringkali mengalami keterlambatan, kurangnya ketersediaan dana yang terdapat pada kas daerah, dan sumber daya manusia yang kurang berkompeten dibidangnya. **Kesimpulan:** pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung sudah efektif. Dikarenakan lima dimensi sudah berjalan dengan efektif, dan dua dimensi belum berjalan dengan efektif. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota bandar lampung dalam pelaksanaan belanja modal akan tetapi pemerintah kota bandar lampung juga sudah memiliki upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Kata kunci: Belanja Modal, Realisasi Anggaran, Pemerintahan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia harus berpijak pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah cara Pemerintah Daerah mengelola keuangannya mencakup perencanaan, penganggaran, penetapan administrasi, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah semua aspek pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan pemerintah daerah meliputi pengelolaan keuangan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dirinci ke dalam kategori tugas tersendiri, kecuali urusan pemerintah yang bersifat mutlak, yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat per Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai bagian dari mandatnya untuk Untuk menunjang pembangunan ekonomi di daerah, Pemerintah Daerah diberikan kendali penuh atas semua sumber daya daerah dan berwenang mengurus sendiri keuangan.

Anggaran berperan penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan keuangan secara rinci disusun untuk membantu tercapainya program kegiatan organisasi. Berbagai macam permintaan masyarakat terhadap organisasi publik, salah satunya keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan publik. Setiap organisasi pemerintah senantiasa menjadikan lebih baik kinerjanya supaya tata kelola pemerintah yang lebih dapat tercapai. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah mampu mengidentifikasi anggaran sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Uang Negara yang bersumber dari rakyat, tidak akan disalah gunakan oleh pengguna anggaran atau oknum yang tidak bertanggungjawab dan pengelenggaraan pemerintahan menjadi efektif.

Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah menjadi sorotan bagi masyarakat karena mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan, kendala yang dihadapi pemerintah Kota Bandar Lampung ialah banyaknya hutang pada keuangan pemerintah. Berdasarkan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, saat ini tersisa 250 miliar rupiah hutang pemerintah Kota Bandar Lampung yang sebelumnya mencapai 653 miliar rupiah pada bulan desember 2021. Pada anggaran belanja modal terdapat realisasi yang terbilang kecil, hal ini sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, dilihat dari banyaknya keluhan pada masyarakat mengenai infrastruktur jalanan dan fasilitas umum yang sudah rusak dan belum memadai.

Pelaksanaan anggaran yang kurang baik akan berdampak terhadap anggaran belanja yang ter hutang. Kecenderungan yang terjadi pada Kabupaten/Kota terkait perencanaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah adanya penyelewengan terhadap dana APBD seperti korupsi dana anggaran, ketimpangan yang terjadi terkait adanya pengeluaran-pengeluaran yang melebihi anggaran, serta adanya pengelembungan belanja dari belanja wajar dan masih banyak lagi peyimpangan yang mungkin terjadi terkait anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada pembahasan terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan belanja modal kecilnya realisasi anggaran belanja daerah yang terjadi pada Kota Bandar Lampung yang disebabkan oleh banyaknya hutang pada keuangan pemerintah. Berdasarkan yang disampaikan oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, saat ini tersisa 250 miliar rupiah hutang pemerintah Kota Bandar Lampung yang sebelumnya mencapai 653 miliar rupiah pada bulan desember 2021. Pada anggaran belanja modal terdapat realisasi yang terbilang kecil, hal ini sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, dilihat dari banyaknya keluhan pada masyarakat mengenai infrastruktur jalanan dan fasilitas umum yang sudah rusak dan belum memadai. Pelaksanaan anggaran yang kurang baik akan berdampak terhadap anggaran belanja yang ter hutang. Kecenderungan yang terjadi pada Kabupaten/Kota terkait perencanaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah adanya penyelewengan terhadap dana APBD seperti korupsi dana anggaran, ketimpangan yang terjadi terkait adanya pengeluaran-pengeluaran yang melebihi anggaran, serta adanya pengelembungan belanja dari belanja wajar dan masih banyak lagi peyimpangan yang mungkin terjadi terkait anggaran pemerintah daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dengan konteks yang sama yaitu pelaksanaan anggaran. Penelitian dengan judul efektivitas pelaksanaan belanja modal dalam masa pandemic covid-19 pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Bengkulu provinsi Bengkulu, Hasil dari penelitian adalah Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sudah efektif (Rydo Tama, 2022). Penelitian dengan judul efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan pendapatan daerah kabupaten wajo, Hasil dari penelitian adalah efektivitas belanja di BPD Kab. Wajo dikatakan sangat efektif. Sedangkan efisiensi belanja BPD Kab. Wajo dikatakan belum memenuhi syarat efisiensi karna secara

keseluruhan belum dilaksanakan secara baik (Cici Sitti Hajaerah Bunna, 2020). Penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Disperkimtan Provinsi Sul-Sel, Hasil Dari Penelitian Tersebut adalah tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sudah maksimal dan kinerja keuangan Dinas perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berhasil dilaksanakan dengan efektif (Heriadi, 2019). Penelitian dengan judul Efektivitas Belanja Modal dan Perolehan Aset Tetap Terhadap Kontribusinya di Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2014-2016, Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas belanja modal dan perolehan aset tetap terhadap kontribusinya di pemerintah kabupaten bekasi belum terlaksana dengan baik, dan tingkat efektivitas yang belum cukup (Aris Priyatin, 2017). Penelitian dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Litbang Kota Palembang Tahun 2012-2016, Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah litbang kota palembang sudah berjalan dengan baik, dilihat dari tingkat efektivitasnya yang sudah mencapai 94% (Uswatun Hasanah, 2018).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus kepada efektivitas pelaksanaan belanja modal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung, metodenya yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif dengan kerangka berpikir induktif Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Efektivitas menurut James L. Gibson (1995: 36) yang memiliki beberapa dimensi dan beberapa indikator yang mendukung kegiatan penelitian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan belanja modal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada efektivitas pelaksanaan belanja modal. Dijelaskan pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis terhadap tujuan penelitian agar terdapatnya suatu hasil dimana peneliti menjadi perangkat kunci dalam penelitian, selanjutnya hasil tersebut dijelaskan dengan kalimat tertulis pada data empiris yang telah didapat dan pendekatan juga menyudutkan makna daripada generalisasi. Dengan penjelasan diatas peneliti memandang bahwa penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan, sebab penelitian ini sangat memungkinkan untuk peneliti mengkaji pada fokus persoalan yang akan penulis melakukan penelitian secara mendalam dan mengkaji lebih luas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Sumber data sekunder, merupakan data yang langsung diperoleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Bisa juga dikatakan data yang tersistematis dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada sumber data sekunder ini, peneliti memperoleh data dari internet dan

jurnal. Sedangkan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori Efektivitas menurut James L. Gibson (1996: 36) menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan dimensi-dimensi serta indikator-indikator yang relevan dengan fenomena yang terjadi di lapangan dalam hal ini dapat dirumuskan terhadap apa yang peneliti sudah teliti di tempat penelitian yang sebelumnya sudah dijadwalkan yaitu di BPKAD Kota Bandar Lampung.

3.1 Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Maka perlu ditetapkan sasaran-sasaran yang sering dikenal dengan istilah tujuan antara yang ingin dicapai pada satu kurun waktu tertentu (Siagan, 2008: 34).

a. Menetapkan tujuan pelaksanaan belanja modal yang hendak dicapai.

tujuan dari pelaksanaan belanja modal ini adalah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan observasi penulis dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal pada pemerintah Kota Bandar Lampung digunakan untuk menambah aset yang bertujuan memberi manfaat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung. Kesimpulan yang dapat diambil dari indikator menetapkan tujuan dari pelaksanaan belanja modal yang hendak dicapai pada dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai berlangsung secara efektif.

b. Menetapkan target dan sasaran

Target dan sasaran dari pelaksanaan belanja modal berdasarkan dari *output/outcome* yang sudah ditentukan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaiannya. Dasar pelaksanaan belanja modal dalam menambah aset pemerintah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung. Kesimpulan yang dapat diambil dari indikator menetapkan target dan sasaran yang terarah pada dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai berlangsung belum efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa manfaat pada program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Kota Bandar Lampung belum pernah dievaluasi, maka belum dapat diketahui program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki manfaat yang signifikan atau tidak pada penyelenggaraan pemerintahan pada Kota Bandar Lampung.

3.2 Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 1996: 104). Indikator yang menunjang kejelasan strategi pencapaian tujuan meliputi menentukan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan dan menentukan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

a. Menentukan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan.

pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan beberapa upaya yang harus dilakukan agar tujuan dari pelaksanaan belanja modal tercapai salah satunya adalah menggunakan anggaran sebaik mungkin dalam menambah aset pemerintah Kota Bandar Lampung. Maka pemerintah Kota

Bandar Lampung berupaya menggunakan anggaran belanja modal dengan membatasi pengeluaran tetapi memaksimalkan penambahan aset bagi pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan observasi penulis dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan upaya yang harus dilakukan hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan belanja modal tahun ini masih sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kesimpulan yang dapat diambil dari indikator Menentukan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan pada dimensi kejelasan strategi pencapaian tujuan berlangsung efektif.

b. Menentukan waktu, dampak dan pemusatan upaya pada pelaksanaan belanja modal.

pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menentukan waktu dan telah menyiapkan beberapa upaya yang harus dilakukan agar tujuan dari pelaksanaan belanja modal tercapai salah satunya adalah menggunakan anggaran sebaik mungkin dalam menambah aset pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya menggunakan anggaran belanja modal dengan membatasi pengeluaran tetapi memaksimalkan penambahan aset bagi pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator menentukan waktu, dampak dan pemusatan upaya pada pelaksanaan belanja modal pada dimensi kejelasan strategi pencapaian tujuan berlangsung efektif.

3.3 Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang mantap

Proses Analisis dan perumusan kebijakan merupakan perilaku dari sebuah organisasi dalam memberikan bimbingan dan berfikir dalam menentukan sebuah keputusan yang akan diambil (Handyaningrat, 1994: 128).

a. Merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan. pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mengikuti peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan belanja modal, akan tetapi pemerintah Kota Bandar Lampung belum menetapkan kebijakan yang signifikan dalam membantu atau mendukung pelaksanaan belanja modal agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga ada beberapa tujuan dari belanja modal yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, ditambah pada masa pandemi yang membuat pelaksanaan belanja modal menjadi terhambat. Kesimpulan dari indikator merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan pada dimensi proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap belum terlaksana secara efektif.

3.4 Perencanaan yang matang

Menurut Siagian (2008: 36) perencanaan adalah sebagai pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu dimasa depan. Perencanaan belanja modal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada dan rencana strategi (Renstra) Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menentukan perencanaan yang matang.

a. Menyusun perencanaan terhadap anggaran belanja modal.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menyusun rencana dan sudah memiliki program-program terkait pelaksanaan belanja modal. Pada tahun ini pemerintah Kota Bandar Lampung lebih fokus dalam pembangunan dan perbaikan jalan untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan observasi penulis diketahui bahwa pada tahun lalu hingga tahun ini pemerintah Kota Bandar Lampung telah banyak memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang ada pada Kota Bandar Lampung. Kesimpulan dari indikator menyusun perencanaan terhadap anggaran belanja modal pada dimensi perencanaan yang matang sudah cukup efektif, dikarenakan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun rencana terkait pelaksanaan belanja modal.

b. Mengembangkan program pelaksanaan belanja modal dimasa yang akan datang.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menyusun beberapa program untuk pelaksanaan belanja modal tetapi pemerintah Kota Bandar Lampung belum mengembangkan program yang sudah ada, pemerintah Kota Bandar Lampung hanya melanjutkan program yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan dari indikator mengembangkan program pelaksanaan belanja modal dimasa yang akan datang pada dimensi perencanaan yang matang dinilai belum efektif, dikarenakan pemerintah Kota Bandar Lampung belum mengembangkan program yang sudah berjalan sebelumnya tetapi hanya melanjutkan atau mengikuti program yang sudah ada.

3.5 Penyusunan Program yang Tepat

a. Menyusun strategi pelaksanaan belanja modal.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah melakukan penyusunan program yang tepat untuk pelaksanaan belanja modal agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Berdasarkan observasi penulis, pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat wawancara yaitu mengurangi pemborosan anggaran karena sebagian besar anggaran digunakan untuk memperbaiki fasilitas bagi masyarakat. Kesimpulan dari indikator menyusun strategi pelaksanaan belanja modal pada dimensi penyusunan program yang tepat dapat dikatakan berjalan dengan cukup efektif.

b. Menyusun pedoman pelaksanaan belanja modal.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah melakukan pelaksanaan anggaran belanja modal sesuai dengan pedoman yang ada yaitu Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan observasi penulis pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai pedoman pada pelaksanaan belanja modal. Kesimpulan dari indikator menyusun pedoman pelaksanaan belanja modal pada dimensi penyusunan program yang tepat sudah dilaksanakan dengan efektif.

3.6 Tersedianya Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan belanja modal.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi sarana yang dinilai beberapa pegawai kurang luas dan ada beberapa prasarana yang kurang bekerja dengan baik yang dikarenakan yang sudah digunakan beberapa tahun. Berdasarkan hasil observasi penulis sarana yang dimiliki oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandar Lampung kondisi baik akan tetapi ruang untuk para pegawai cukup kecil sehingga pergerakan dari pegawai menjadi sedikit terganggu sedangkan prasarana yang dimiliki sudah cukup lawas sehingga menghambat tugas dari para pekerja yang ada di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandar Lampung. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandar Lampung belum efektif.

3.7 Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2 bahwa salah satu unsur pengelolaan keuangan daerah yaitu Pengawasan dan Pengendalian (Pelaporan).

a. Pengendalian terhadap pelaksanaan belanja modal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja modal dengan cara menerapkan sistem keterbukaan dan transparansi, dan anggaran yang digunakan segera dilaporkan secara jelas dan rinci sehingga pelaksanaan belanja modal sesuai dengan tujuan awal. Berdasarkan hasil observasi penulis dapat diketahui bahwa benar adanya pelaporan yang rinci terhadap penggunaan anggaran yang mana dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran yang hasilnya dapat dilihat secara langsung. Kesimpulan indikator pengendalian terhadap pelaksanaan belanja modal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada dimensi sistem pengawasan dan pengendalian berjalan dengan efektif.

b. Mencegah kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan belanja modal.

Sistem pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan belanja modal sudah cukup baik karena setiap anggaran yang digunakan memiliki laporan yang dapat dipertanggung jawabkan kedepannya. Sistem keterbukaan dan transparansi juga diterapkan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah hal ini yang membuat pengawasan terhadap anggaran menjadi lebih baik karena pelaporannya bisa diakses oleh siapapun. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah berjalan dengan efektif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait efektivitas pelaksanaan belanja modal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung berlangsung efektif. Berdasarkan ketiga belas indikator menunjukkan delapan berlangsung secara efektif sedangkan lima indikator belum dapat dikatakan efektif. Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan belanja modal pemerintah Kota Bandar Lampung seperti masalah dalam segi pelaporan yang seringkali mengalami keterlambatan, kurangnya ketersediaan dana yang terdapat pada Kas Daerah Kota Bandar Lampung yang disebabkan oleh sering terjadi keterlambatan pada dana pendapatan transfer dan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan sumber daya manusia yang kurang berkompeten menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja modal. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan pelaksanaan belanja modal adalah memaksimalkan waktu yang ada untuk membuat pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, melakukan koordinasi dengan dinas terkait pendapatan daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya agar pelaksanaan belanja modal dapat berjalan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada tempat saja yaitu badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandar Lampung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta memperoleh informasi dan data guna menyelesaikan penelitian, selanjutnya disampaikan terima kasih kepada teruntuk seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James. L. et all. (1995). *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Edisi ke-5*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu S.P. (1996). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Siagian, Sondang. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bunna, Cici Sitti Hajaerah. (2021). *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*.
- Heriadi (2019). *Analisis Efektivitas Pelaksanan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Disperkintan Provinsi Sul-Sel*.
- Hasanah, Uswatun. (2018). *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Litbang Kota Palembang Tahun 2012-2016*.
- Priyatin, Aris. (2017). *Efektivitas Belanja Modal dan Perolehan Aset Tetap Terhadap Kontribusinyadi Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2014-2016*.
- Tama, Rydo. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi COVID-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu*.